

Dampak persaingan geopolitik amerika serikat dan tiongkok terhadap posisi strategis indonesia di asia pasifik

Ina Nugraheni

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 24050111277@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Amerika serikat, tiongkok, indonesia, asia pasifik. Persaingan geopolitik

Keywords:

United states, china, indonesia, asia pacific. Geopolitical competition

ABSTRAK

Persaingan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara kepulauan terbesar yang terletak di jantung Indo-Pasifik, Indonesia memiliki posisi strategis yang dipengaruhi langsung oleh rivalitas kedua kekuatan besar tersebut. Artikel ini menganalisis dampak persaingan AS–Tiongkok terhadap posisi strategis Indonesia, terutama dalam bidang keamanan, ekonomi, dan diplomasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa rivalitas ini membawa tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Di bidang keamanan, Indonesia menghadapi

tekanan di Laut Tiongkok Selatan dan harus memperkuat pertahanan maritimnya. Secara ekonomi, Indonesia berupaya memanfaatkan persaingan ini untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan, sembari menjaga kemandirian ekonomi. Dalam ranah diplomasi, Indonesia konsisten menerapkan politik luar negeri bebas-aktif dengan “mendayung antara dua karang”, tidak memihak salah satu blok, serta mengedepankan sentralitas ASEAN. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berusaha mempertahankan otonomi

ABSTRACT

The geopolitical rivalry between the United States and China in the Asia-Pacific region has intensified in recent years. As the largest archipelagic state located in the heart of the Indo-Pacific, Indonesia holds a strategic position directly impacted by the contest between these two major powers. This article analyzes the implications of the US–China rivalry on Indonesia's strategic position, particularly in the domains of security, economy, and diplomacy. The findings indicate that this competition poses both challenges and opportunities for Indonesia. In terms of security, Indonesia faces growing pressure in the South China Sea and must enhance its maritime defense. Economically, Indonesia seeks to leverage the rivalry to attract investment and increase trade while maintaining economic autonomy. Diplomatically, Indonesia consistently upholds its independent and active foreign policy by “navigating between two reefs,” refusing to align with any bloc, and emphasizing ASEAN centrality. Through this approach, Indonesia aims to preserve its strategic autonomy and reinforce its role as a middle power contributing to regional stability.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi dinamika utama di kawasan Asia Pasifik dalam dekade terakhir. Kedua negara terlibat dalam kontestasi pengaruh, baik dalam aspek militer, ekonomi, maupun diplomatik, yang berdampak luas pada negara-negara kawasan. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, berada pada posisi geografis dan geopolitik yang sangat strategis di tengah rivalitas tersebut. Terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik dengan jalur pelayaran internasional yang vital, Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas regional. Rivalitas AS–Tiongkok berpotensi memengaruhi lingkungan keamanan Indonesia, peluang ekonomi, serta ruang gerak diplomasi negara ini.

Dalam konteks persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik, posisi strategis Indonesia menjadi semakin penting dan rentan terhadap tarik-menarik kepentingan global. (Faslah, 2024) menekankan bahwa pemahaman dan penguatan identitas nasional harus menjadi dasar dalam merumuskan strategi geopolitik Indonesia agar mampu menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional di tengah tekanan kekuatan besar dunia. Indonesia memiliki doktrin politik luar negeri bebas dan aktif yang dicetuskan sejak era awal kemerdekaan. Prinsip ini berarti Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun serta aktif mendorong terciptanya perdamaian dan kerja sama internasional.

Dalam konteks Perang Dingin, Wakil Presiden Mohammad Hatta merumuskan strategi “mendayung antara dua karang” untuk menjaga Indonesia agar tidak terseret arus konflik antara dua kekuatan besar. Prinsip ini tetap relevan menghadapi rivalitas AS–Tiongkok masa kini (Bao, 2022). Indonesia berupaya menjaga hubungan bersahabat dengan kedua negara besar tersebut tanpa terjebak dalam aliansi militer formal (Anwar, 2023). Sebagai *middle power* (kekuatan menengah), Indonesia juga berusaha memainkan peran penyeimbang dan penengah di tingkat regional.

Artikel ini akan membahas dampak persaingan geopolitik AS–Tiongkok terhadap posisi strategis Indonesia di Asia Pasifik. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama: keamanan, ekonomi, dan diplomasi. Dengan menganalisis perkembangan terkini (2019–2024) dan merujuk pada literatur ilmiah kredibel, diharapkan pemahaman komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dapat diperoleh.

Pembahasan

Dampak terhadap Keamanan

Dalam bidang keamanan, rivalitas AS–Tiongkok berimplikasi langsung pada kepentingan strategis Indonesia, khususnya terkait Laut Tiongkok Selatan. Meskipun Indonesia bukan pihak pengklaim langsung dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, perairan Natuna di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sering menjadi area insiden akibat klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok. Peningkatan aktivitas kapal coast guard dan nelayan Tiongkok di perairan Natuna Utara telah mendorong Indonesia untuk mengambil langkah tegas demi melindungi kedaulatan dan hak berdaulatnya.

Pada tahun 2020, Indonesia mengerahkan tambahan pasukan dan kapal perang ke Perairan Natuna sebagai respons terhadap masuknya kapal-kapal Tiongkok (Rahmat, 2020). Pemerintahan Presiden Joko Widodo bahkan menamai ulang kawasan perairan di sekitar Natuna menjadi Laut Natuna Utara dan menerbitkan peta baru, sebagai pernyataan sikap hukum dan politis bahwa wilayah tersebut berada di yurisdiksi Indonesia (Jibiki, 2022).

Di sisi lain, meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok mendorong Indonesia untuk mempererat kerja sama pertahanan dengan mitra-mitra seperti Amerika Serikat dan negara-negara kawasan yang memiliki pandangan senada. Walaupun Indonesia teguh menyatakan tidak akan bersekutu secara militer, pendekatan pragmatis terlihat dalam berbagai latihan dan kerja sama keamanan. Misalnya, Indonesia telah mengadakan latihan militer bersama AS (seperti Latihan Garuda Shield) yang skalanya diperluas dengan mengundang negara lain, sebagai upaya meningkatkan kemampuan pertahanan sekaligus mengirim sinyal komitmen terhadap stabilitas regional.

Pada 2021, Indonesia menyambut baik inisiatif Maritime Security Initiative dari AS yang membantu peningkatan kapasitas maritim Indonesia. Bahkan, meski menjaga posisi non-blok, Indonesia menerima bantuan peralatan militer dari berbagai negara dan membeli alutsista dari beragam sumber (misalnya pesawat tempur Prancis dan Amerika) untuk memastikan balance of power lokal yang menguntungkan keamanan nasional.

Persaingan AS–Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik juga mendorong munculnya aliansi dan pakta baru seperti QUAD (AS, Jepang, India, Australia) dan AUKUS. Indonesia menyikapi inisiatif-inisiatif tersebut dengan kehati-hatian. Sebagai contoh, Indonesia sempat menyatakan kekhawatiran terhadap pakta AUKUS yang berencana menghadirkan kapal selam nuklir di Australia, karena dikhawatirkan memicu perlombaan senjata di kawasan. Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menjaga agar rivalitas kekuatan besar tidak berkembang menjadi ancaman langsung bagi keamanan regional. Indonesia terus mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan menghormati hukum internasional seperti UNCLOS 1982.

Secara keseluruhan, di bidang keamanan Indonesia berupaya “strategic hedging”, yaitu menjaga hubungan baik dengan Tiongkok sekaligus memperkuat kerja sama pertahanan dengan AS dan negara lain sebagai antisipasi (Anwar, 2023). Strategi hedging ini memungkinkan Indonesia memaksimalkan manfaat keamanan (seperti bantuan kapabilitas militer) tanpa terikat dalam permusuhan terbuka dengan salah satu pihak. Tujuan utamanya adalah menjaga otonomi strategis Indonesia agar mampu mengambil keputusan keamanan secara independen sesuai kepentingan nasional, sembari berkontribusi pada stabilitas kawasan (Amnesti, 2024).

Dampak terhadap Ekonomi

Rivalitas dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini juga berdampak signifikan pada perekonomian dan posisi geo-ekonomi Indonesia. Dari satu sisi, kebangkitan ekonomi Tiongkok membawa peluang besar. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus sumber investasi asing utama terutama di sektor infrastruktur dan manufaktur. Inisiatif Belt and Road (BRI) Tiongkok sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia, contohnya proyek kereta cepat

Jakarta–Bandung yang didanai Tiongkok. Peningkatan investasi dan perdagangan dengan Tiongkok telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah menyambut baik kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan ini (Fitriani, 2021). Di sisi lain, Indonesia juga berusaha menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan Amerika Serikat. AS merupakan salah satu sumber investasi penting (termasuk di sektor energi dan digital) dan pasar ekspor yang potensial bagi komoditas Indonesia.

Persaingan AS–Tiongkok memicu trade war dan saling pengenaan tarif beberapa tahun lalu, yang sempat menimbulkan gejolak pada rantai pasok global. Bagi Indonesia, situasi ini menciptakan tantangan berupa ketidakpastian pasar dan tekanan untuk memilih pihak. Namun, terdapat pula peluang: sejumlah perusahaan multinasional mulai memindahkan basis produksi dari Tiongkok ke Asia Tenggara guna menghindari tarif AS, dan Indonesia berusaha menarik relokasi investasi tersebut untuk mendorong industrialisasi domestik. Pemerintah Indonesia menawarkan insentif bagi investor, memperbaiki iklim usaha, dan membangun kawasan industri (seperti di Batang dan Kendal) untuk memanfaatkan momentum pergeseran rantai pasok global akibat rivalitas AS–Tiongkok.

Pada ranah kerja sama ekonomi multilateral, Indonesia turut aktif dalam forum yang melibatkan kedua negara besar. Indonesia adalah anggota G20 yang kerap menjadi ajang diskusi isu perang dagang dan pemulihan ekonomi global. Pada 2022, Indonesia selaku Ketua G20 memainkan peran jembatan antara delegasi AS dan Tiongkok dalam merumuskan komunikasi bersama, menunjukkan kapasitas diplomasi ekonomi Indonesia meski rivalitas memanas. Selain itu, Indonesia bergabung dalam kerangka kerja sama ekonomi Indo-Pasifik yang diinisiasi AS, yaitu Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), dengan harapan dapat ikut menyusun aturan ekonomi kawasan yang inklusif dan sesuai kepentingan nasional. Secara paralel, Indonesia juga merupakan anggota aktif RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang didorong Tiongkok. Keterlibatan di kedua inisiatif ini mencerminkan upaya Indonesia menjaga keseimbangan dan mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak (Anshory et al., 2023).

Dalam konteks persaingan ini, Indonesia menyadari pentingnya menjaga kemandirian ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu negara. Diversifikasi mitra dagang dan sumber investasi menjadi kunci. Pemerintah fokus memperkuat ketahanan ekonomi domestik, misalnya melalui program substitusi impor di sektor strategis, pengembangan industri hilir (seperti hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik), dan percepatan transformasi digital. Studi terbaru menekankan bahwa menjaga hubungan baik dengan AS dan Tiongkok secara berimbang akan sangat penting untuk menarik investasi dan memperluas perdagangan, sambil menghindari ketergantungan berlebihan (Ibrahim et al., 2023). Indonesia juga perlu meningkatkan infrastruktur dan kualitas SDM untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital dan industri masa depan yang didorong persaingan teknologi antara AS dan Tiongkok (Ibrahim et al., 2023).

Dengan memanfaatkan rivalitas secara strategis, Indonesia berpeluang mendapatkan: investasi dan alih teknologi dari Tiongkok maupun dukungan pendanaan dan akses pasar dari negara-negara Barat pimpinan AS. Tantangannya

adalah memastikan bahwa keterlibatan ekonomi kedua kekuatan ini tidak mengurangi independensi kebijakan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, tata kelola utang luar negeri, evaluasi proyek investasi asing, dan perlindungan terhadap industri nasional menjadi perhatian utama guna menghindari pengaruh eksternal yang berlebihan (Ibrahim et al., 2023).

Dampak terhadap Ekonomi

Dari aspek diplomasi, rivalitas AS–Tiongkok menempatkan Indonesia dalam posisi strategis yang menuntut kecermatan dalam menjaga kepentingan nasional tanpa terjebak dalam blok tertentu. Konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia menjalin kerja sama dengan kedua belah pihak tanpa berpihak secara eksplisit (Anwar, 2023). Dalam konteks ini, Indonesia menerapkan strategi non-aliansi fleksibel, yang digambarkan sebagai "mendayung antara dua karang", sambil mendorong ASEAN membentuk "jalan ketiga" berupa tatanan kawasan yang inklusif dan tidak didominasi satu kekuatan (Bao, 2022).

Salah satu wujud konkritnya adalah inisiatif ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang dipelopori Indonesia sejak 2019. AOIP menegaskan pentingnya kerja sama, inklusivitas, dan penghormatan hukum internasional, sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan blok (Abbondanza, 2022). Indonesia juga aktif memanfaatkan forum multilateral seperti G20 dan ASEAN untuk menjaga sentralitas kawasan dan mencegah polarisasi. Saat menjadi Ketua ASEAN 2023, Indonesia mendorong dokumen konsensus yang menegaskan posisi netral ASEAN di tengah rivalitas geopolitik.

Kebijakan ini diapresiasi kedua belah pihak. AS menganggap Indonesia mitra demokratis strategis (Blinken, 2021), sedangkan Tiongkok melihat Indonesia sebagai mitra independen yang tidak mengancam kepentingan mereka. Posisi netral ini memungkinkan Indonesia memainkan peran penyeimbang yang dihormati. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti tekanan dalam isu HAM Uyghur atau klaim ZEE oleh Tiongkok. Meski demikian, Indonesia tetap menekankan pendekatan "netral aktif" yang mengedepankan prinsip, kerja sama inklusif, dan stabilitas kawasan.

Kesimpulan dan Saran

Persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok membawa dampak multifaset terhadap posisi strategis Indonesia di Asia Pasifik. Dalam aspek keamanan, rivalitas ini mendorong Indonesia untuk memperkuat pertahanan, khususnya di wilayah maritim, serta menjalin kerja sama keamanan secara selektif tanpa mengorbankan prinsip non-blok. Di bidang ekonomi, persaingan kedua negara membuka peluang investasi, perdagangan, dan alih teknologi, namun menuntut kewaspadaan agar kemandirian ekonomi tetap terjaga dan Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap salah satu pihak.

Sementara itu, secara diplomatik, Indonesia menjalankan strategi hedging dan bebas-aktif, menolak politik zero-sum, serta mendorong platform kerja sama yang

inklusif seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai bentuk “jalan ketiga” dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar (Bao, 2022; Anwar, 2023;). Untuk mengoptimalkan posisi tersebut, Indonesia perlu memperkuat ketahanan nasional baik di sektor pertahanan maupun ekonomi, meningkatkan daya saing industri domestik, dan melakukan diversifikasi mitra dagang serta investasi.

Di sisi diplomasi, Indonesia perlu terus mengukuhkan peran kepemimpinannya di ASEAN serta forum regional lain, mendorong kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam meredam ketegangan, sekaligus menjaga konsistensi politik luar negeri bebas-aktif yang berpijak pada prinsip dan kepentingan nasional. Indonesia memerlukan strategi yang cerdas dan adaptif sehingga dapat berpeluang menavigasi rivalitas AS–Tiongkok secara konstruktif dan memperkuat posisinya sebagai middle power yang mandiri dan berpengaruh di kawasan.

Daftar Pustaka

- Abbondanza, G. (2022). Whither the Indo-Pacific? Middle power strategies from Australia, South Korea and Indonesia. *International Affairs*, 98(2), 403–421.
- Amnesti, S. K. W. (2024). Politik hukum perlindungan perempuan pekerja domestik di Indonesia. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 19(1), 35–44. <http://repository.uin-malang.ac.id/20185/>
- Anshory, A. M. A., Fikri, M. M., Ramadinna, F., & Haykal, M. Z. (2023). Analisis balance of threat dari pengaruh politik internasional Cina di Indo-Pasifik: Tinjauan teori realisme. *Spektrum*, 20(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/19382/>
- Anwar, D. F. (2023). Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US-China rivalry in the Indo-Pacific region. In *Navigating International Order Transition in the Indo-Pacific* (pp. 125–151). Routledge.
- Bao, G. (2022). China–US strategic competition and Indonesia's status anxiety. *East Asian Affairs*, 2(02), 2250011.
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Fitriani, E. (2021). Linking the impacts of perception, domestic politics, economic engagements, and the international environment on bilateral relations between Indonesia and China in the onset of the 21st century. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(2), 183–202.
- Ibrahim, M., Sukandar, R., & Nusantara, L. A. (2023). Indonesia's economic advancement through leveraging the geopolitical rivalry and geostrategic between the usa and china in the indo-pacific region. *Jurnal Pertahanan Media Informasi TTG Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity Nasionalism & Integrity*, 9(2), 379.
- Jibiki, K. (2022). *Indonesia looks to form special economic zone in South China Sea*. *Nikkei Asia*. <https://asia.nikkei.com/Politics/Indonesia-looks-to-form-special-economic-zone-in-South-China-Sea>

Rahmat, R. (2020). *Indonesia makes largest-ever deployment of troops, equipment to South China Sea island*. <https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/indonesia-makes-largest-ever-deployment-of-troops-equipment-to-south-china-sea-island>